

RANCANG BANGUN INOVASI

APLIKASI E-KINO (Elektronik Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi)

DASAR HUKUM

Grand design Reformasi Birokrasi 2010 -2025 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 bermakna reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Road map reformasi birokrasi dijelaskan lebih detail dan khusus pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 bahwa terdapat tujuh agenda pembangunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari visi misi presiden. Peran Kementerian PANRB secara langsung ada pilar ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Pada upaya penegakann pilar ketujuh ini, pemerintah kemudian menetapkan bahwa terdapat satu program prioritas, yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Program prioritas ini kemudian ditopang dengan empat kegiatan prioritas, yaitu; 1) penguatan implementasi manajemen ASN; 2) penataan kelembagaan dan proses bisnis; 3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4) transformasi pelayanan public. Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 dan telah selaras dengan RPJMD 2021 – 2026.

PERMASALAHAN

Lambatnya perkembangan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; 1) minimnya pemahaman dan kesadaran Aparatur Sipil Negara mengenai RB untuk melakukan pembenahan pada sistem birokrasi itu sendiri, 2) kualitas Aparatur Sipil Negara yang dinilai kurang cakap dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dapat menghambat perkembangan RB itu sendiri. Selain itu tahun 2021 Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Perubahan tersebut memengaruhi semua sepek mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pula terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berjalan lambat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Balangan tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi semata, namun merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan birokrasi yang berbasis kinerja, RB harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pelaksanaan RB pada periode sebelumnya. Guna mewujudkan birokrasi yang berbasis pada kinerja, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB, diantaranya dengan proses monitoring dan evaluasi (monev) secara internal dan eksternal. Monev secara internal dilakukan melalui pemantauan terhadap rencana kerja (working plan) yang ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan perbaikan RB disetiap area perubahan dan program quick wins serta penilaian pelaksanaan RB secara mandiri (PMPRB) yang didasarkan pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

ISU STRATEGIS

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan Langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Instansi pemerintah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas fleksibel tanpa batas.

Dalam rangka memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja, memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif, dan melindungi ASN dari resiko penularan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan RB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menegaskan akan

pentingnya penerapan clean government dan good governance secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 area perubahan dan 1 program Quick Wins RB Area Manajemen Perubahan (Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja), Area Derigulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Ketatalaksanaan, Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Area Penguatan Pengawasan, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Program Quick Wins.

METODE PEMBAHARUAN

Kondisi Sebelum Inovasi

Penerapan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Balangan saat ini masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Kabupaten Balangan. Sedangkan penerapan pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Aspek pemenuhan data dukung RB pun masih terkategori minim. Kondisi lain yang terjadi di tata kelola Pemerintahan Kabupaten Balangan adalah pemenuhan data dukung dan implementasi nyata area perubahan pada level SKPD yang masih belum sesuai dengan harapan.

Kondisi Setelah Inovasi

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya penggunaan Aplikasi E-Kino adalah:

1. Pencapaian target kinerja SKPD khususnya pada area akuntabilitas lebih terkontrol.
2. Data kinerja area penataan organisasi, area manajemen perubahan, area pelayanan public, area akuntabilitas, serta arah pengembangan kedepan area tata laksana lebih mudah terintegrasi.
3. Data dukung terkait penilaian kinerja SKPD terhimpun dalam satu alamat sehingga lebih memudahkan dalam proses penilaian kinerja SKPD.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan atau kebaruan dari aplikasi E-Kino adalah realisasi dan capaian kinerja dapat dipantau sehingga pembinaan terhadap objek capaian yang masih rendah dapat

dilakukan. Keunggulan atau kebaruan lain adalah sistem pada aplikasi ini dapat secara langsung menghasilkan nilai indeks budaya kerja SKPD.

TAHAPAN INOVASI

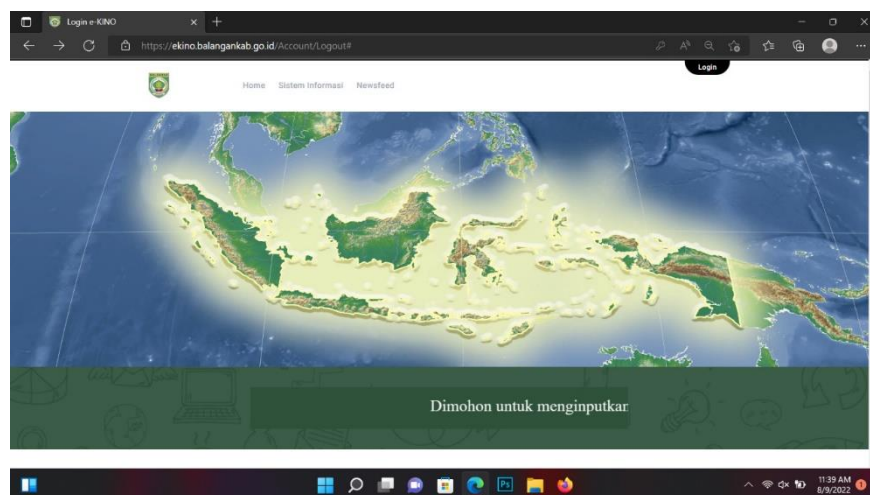
Tahapan inovasi pada aplikasi E-Kino adalah sebagai berikut:

1. Membuka website ekino.balangkab.go.id
2. Login
3. Memilih menu. Menu yang tersedia ada menu area manajemen perubahan, menu area penataan organisasi, menu area pelayanan public, menu area penguatan akuntabilitas, menu area tata laksana.
4. Untuk keluar, tekan logout.

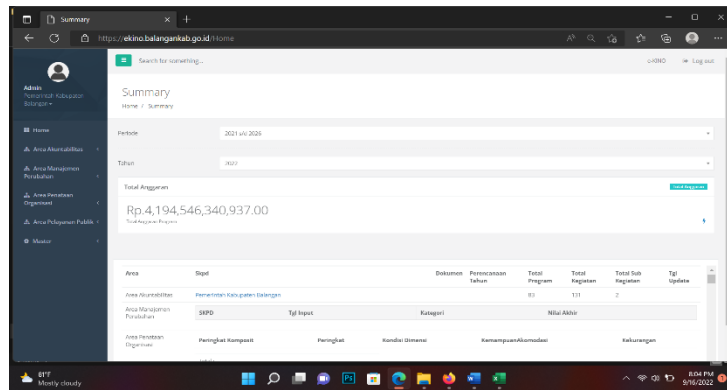
Sedangkan untuk pengelolaan data kinerja pada aplikasi EKino adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Kinerja RB Oleh Bidang Teknis.
2. Mengentry Data Kinerja sesuai area RB oleh admin SKPD
3. melakukan verifikasi data oleh Admin Kabupaten
4. Melakukan Publish Data kepada Atasan oleh Admin Kabupaten
5. Menyajikan Data Informasi dalam Web oleh Kabag Organisasi

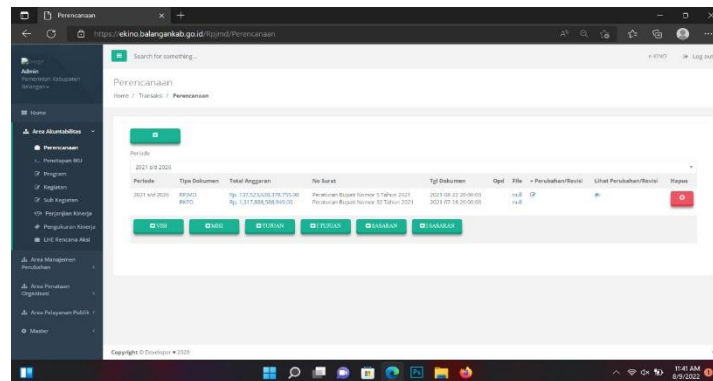
SCREENSHOOT BAGIAN BERANDA/HALAMAN DEPAN DAN BAGIAN PROSES LAYANAN



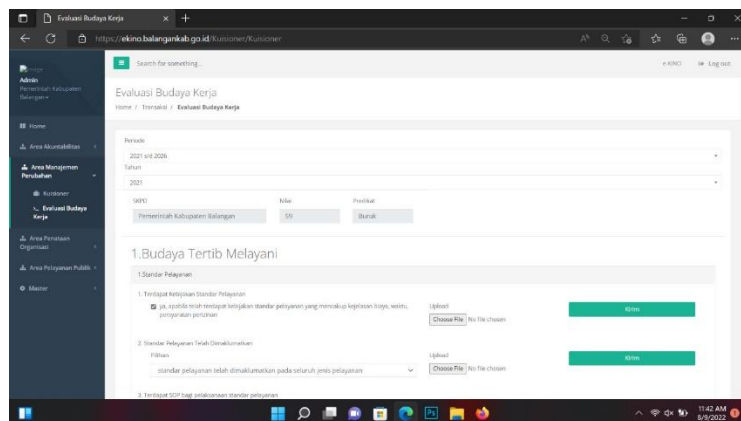
GAMBAR 1 TAMPILAN DEPAN APLIKASI E-KINO



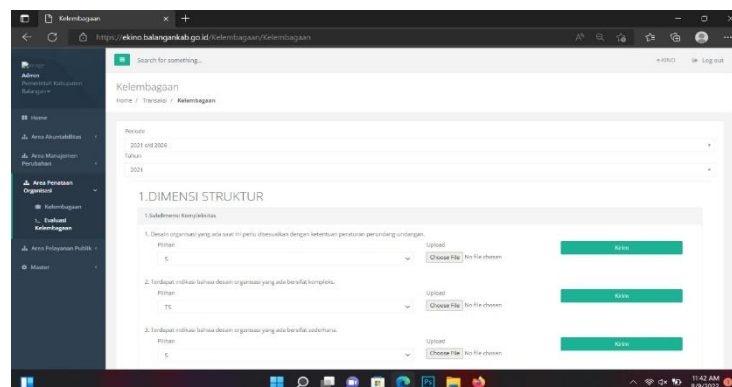
GAMBAR 2 TAMPILAN BERANDA APLIKASI E-KINO



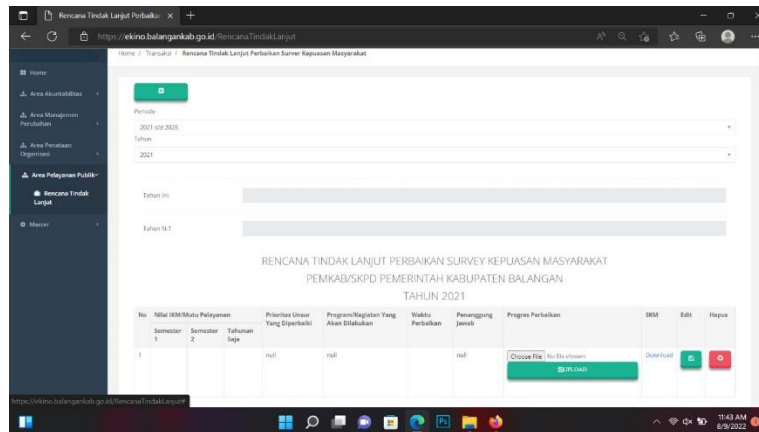
GAMBAR 3 TAMPILAN AREA AKUNTABILITAS



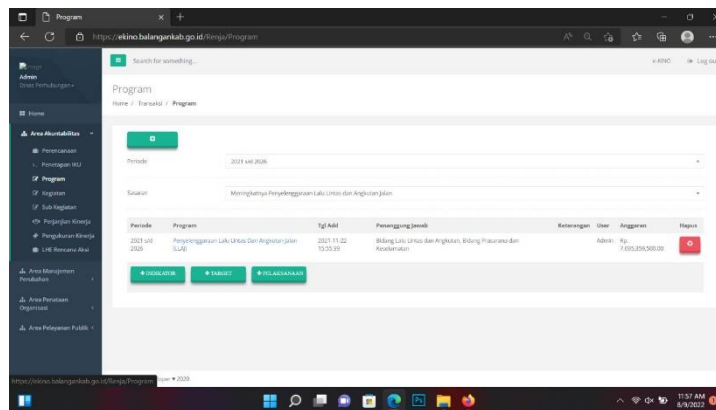
GAMBAR 4 TAMPILAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN



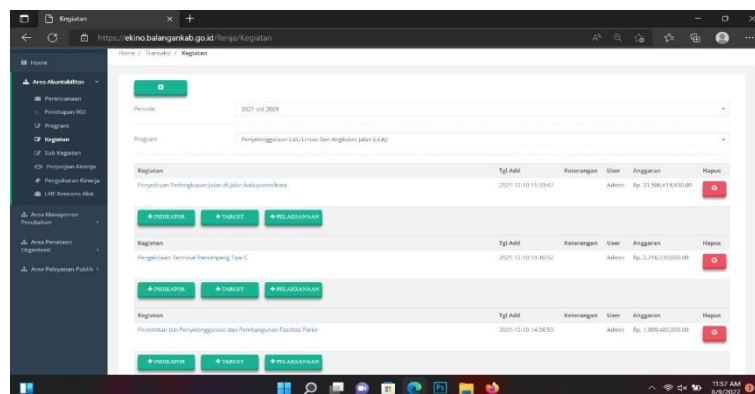
GAMBAR 5 TAMPILAN AREA PENATAAN ORGANISASI



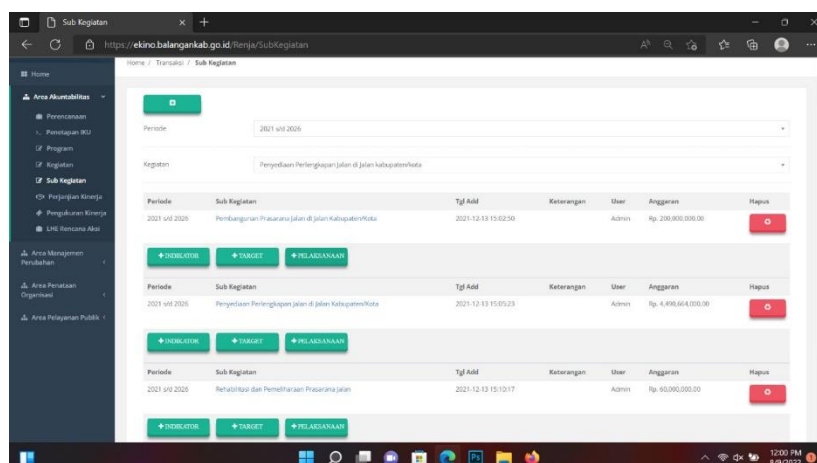
GAMBAR 6 TAMPILAN AREA PELAYANAN PUBLIK



GAMBAR 7 TAMPILAN INPUT PROGRAM (AKUNTABILITAS)



GAMBAR 8 TAMPILAN INPUT KEGIATAN (AKUNTABILITAS)



GAMBAR 9 TAMPILAN INPUT SUB KEGIATAN (AKUNTABILITAS)